

Partisipasi Politik dan Perilaku Kekerasan di Indonesia Tinjauan Psikologi Politik

Buchory Muh Sukemi

Political participation as one of democratic state characteristics may be formed as election, lobbying, organization, connection, and violence behavior. Violence behavior is the form of political participation which frequency was rise since reformation era. With political psychology consideration, there are several theories explaining that violence behavior is influenced by (a) the model that was studies from experiences and observations (social study theory), (b) instinct that was brought since infant (instinct theory), (c) personal character (personality theory), (d) reciprocal interaction between personal factors (cognitive theory), and (e) frustration (aggressive-frustration theory). The political participation enhancement on reformation era, need to be managed without violence behavior.

Kata kunci: kekerasan, politik, psikologi, partisipasi, dan perilaku.

Aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia adalah insan politik (*zoon politicon*). Sebagai insan politik manusia senantiasa merasa saling ketergantungan, keterkaitan, dan saling mempengaruhi satu sama lain karena dengan terwujudnya kebersamaan maka terciptalah wahana untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dengan demikian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, setiap individu senantiasa terkait dengan politik dalam arti yang luas. Masyarakat yang merupakan kumpulan individu memiliki harapan dan tujuan yang akan dicapai. Untuk itu diperlukan adanya norma-norma yang mengatur berbagai aktivitas bersama yang harus selalu ditegakkan. Upaya menegakkan norma-norma tersebut menuntut adanya

lembaga pemerintah yang memiliki otoritas atau kedaulatan agar norma-norma yang ada dapat ditaati. Berbagai unsur di atas merupakan kesatuan yang terkait dengan politik maka masyarakat yang ada di dalamnya merupakan kelompok individu yang tidak dapat lepas dari persoalan politik.

Pada dasarnya politik merupakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan dari sistem tersebut (Budiardjo, 2003). Kegiatan menentukan tujuan merupakan proses seleksi dari berbagai alternatif serta menentukan prioritasnya. Kegiatan melaksanakan tujuan berarti menentukan kebijakan umum (*public policy*) yang berupa pengaturan maupun alokasi sumber daya yang ada dalam masyarakat. Sementara itu

untuk melaksanakan kebijakan umum tersebut diperlukan adanya kekuasaan (*power*) untuk menegakkan norma-norma, menciptakan kerjasama, dan menyelesaikan konflik serta kekerasan yang timbul. Dalam kerangka kehidupan politik, senantiasa terjadi interaksi antar individu dalam masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Di satu pihak ada perintah yang dikeluarkan dan ditaati oleh pihak lain, ada keputusan yang ditetapkan dan ditaati atau ditolak oleh pihak lain.

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 1999). Interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, antar lembaga politik, dan antara kelompok dengan individu di dalam masyarakat dalam upaya pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Perilaku politik merupakan pencerminan dari budaya politik suatu masyarakat yang penuh dengan aneka ragam karakter dan aneka bentuk kelompok dengan berbagai macam tingkah lakunya. Perilaku politik tidak ditentukan oleh situasi temporer, tetapi mempunyai pola yang berorientasi pada pola umum yang tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik yang seringkali disebut sebagai peradaban politik. Dengan demikian perilaku politik tumbuh atas kesadaran yang mendalam tentang sistem politik yang berlangsung dalam suatu negara. Istilah perilaku politik berbeda dengan partisipasi politik, karena perilaku politik menekankan pada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sedangkan partisipasi politik menekankan pada kegiatan yang dilakukan oleh warganegara.

Partisipasi Politik

Di negara yang menganut paham demokrasi, partisipasi politik merupakan aspek yang sangat penting dan merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang kehidupan masyarakatnya masih tergolong tradisional dan sifat kepemimpinan politiknya ditentukan oleh segolongan elit penguasa, maka partisipasi warganegara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara relatif sangat rendah dan bahkan mereka cenderung kurang diperhitungkan dalam proses politik. Sementara itu di negara-negara yang proses modernisasi politiknya telah berjalan baik, maka tingkat partisipasi politik warganegara cenderung meningkat.

Budiardjo (2003) menyatakan bahwa partisipasi politik mencakup semua kegiatan suka rela melalui mana seseorang ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam penentuan kebijakan pemerintah. Huntington dan Nelson (2001) juga menegaskan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warganegara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat pemerintah. Kegiatan tersebut dilakukan baik secara legal maupun illegal dan apakah berhasil atau tidak.

Pengertian partisipasi politik sebagaimana dikemukakan oleh Huntington dan Nelson tersebut mencakup hal-hal berikut : (a) partisipasi politik meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tindakan politik, (b) partisipasi politik dilakukan oleh warganegara biasa dan bukan oleh pejabat pemerintah, (c) kegiatan partisipasi politik itu dimaksudkan untuk mempengaruhi

pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan ini dapat berupa usaha membujuk atau menekan pejabat pemerintah untuk menggagalkan keputusan, atau agar pemerintah lebih memperhatikan terhadap keinginan mereka. Partisipasi politik yang demikian itu merupakan tindakan-tindakan yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah meskipun hal itu dilakukan secara legal maupun tidak. Dengan demikian kegiatan seperti demonstrasi, protes, kekerasan, amuk massa, bahkan bentuk kekerasan dan pemberontakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dapat disebut partisipasi politik, (d) partisipasi politik juga mencakup semua kegiatan untuk mempengaruhi pemerintah terlepas tindakan itu efektif atau tidak, dan berhasil atau gagal, (e) partisipasi politik dilakukan secara langsung oleh pelakunya sendiri maupun secara tidak langsung melalui perantara, yaitu orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan aspirasi mereka.

Pendapat senada dikemukakan oleh Almond (dalam Mas'ood dan MacAndrew 1999) yang mengemukakan bahwa partisipasi politik dapat berupa kegiatan politik "konvensional", yaitu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern, seperti: pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Partisipasi politik yang non-konvensional meliputi pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap harta benda (amuk massa, perusakan, pembakaran, pengeboman), tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan dan pembunuhan), perang gerilya, dan revolusi.

Sebagai kegiatan di bidang politik, partisipasi politik dibedakan menjadi

partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Termasuk dalam partisipasi politik aktif, yaitu mengajukan usul tentang suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintahan. Sementara kegiatan yang termasuk dalam partisipasi politik pasif adalah kegiatan menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Di samping kedua jenis partisipasi tersebut terdapat sekelompok anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi politik aktif maupun pasif dan mereka dinamakan kelompok apatis atau disebut juga golongan putih (golput).

Milbrath dan Goel (1997) membedakan partisipasi politik menjadi empat kategori, yaitu (a) apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik, (b) spektator, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum, (c) gladiator, yakni mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, seperti aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat, dan (d) pengkritik, yaitu partisipasi dalam bentuk non-konvensional. Di samping itu partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelakunya sehingga dikenal partisipasi politik individual dan partisipasi politik kolektif.

Berbagai jenis kegiatan yang termasuk dalam partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson (2001) adalah kegiatan pemilihan, pelobian, kegiatan organisasi, mencari koneksi, dan perilaku kekerasan. Kegiatan pemilihan meliputi pemberian suara, bantuan-bantuan kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, menarik masuk atas nama calon, atau tindakan lain yang

direncanakan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan. Pelobian meliputi usaha-usaha yang dilakukan secara individual atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan suatu pandangan guna mempengaruhi keputusan mereka atas masalah yang mempengaruhi sejumlah orang. Kegiatan organisasi melibatkan partisipasi sebagai seorang anggota atau petugas organisasi yang mempunyai tujuan utama, yaitu mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Yang dimaksud dengan mencari koneksi adalah tindakan individual yang ditujukan kepada pejabat pemerintah dan lazimnya direncanakan untuk menimbulkan keuntungan bagi seseorang atau kelompok kecil orang. Tindak kekerasan atau perilaku kekerasan merupakan tindakan individual atau kelompok yang berusaha untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah dengan melakukan kerusakan fisik baik pada manusia maupun harta benda.

Perilaku Kekerasan

Kekerasan merupakan salah satu kejahatan struktural yang paling berbahaya. Menurut Haryatmoko (2003) kekerasan yang sulit dibongkar adalah kekerasan psikologi yang dipakai dalam sistem sosial politik. Secara sistematis bentuk kekerasan ini lazimnya diterapkan oleh penguasa otoriter untuk menghadapi lawan politik, melemahkan oposisi, dan sejenisnya. Kekerasan psikologi terkait dengan kekerasan negara atau kekerasan yang terlembagakan. Dinamakan kekerasan yang terlembagakan karena kekerasan ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan tetapi didukung oleh bangunan sistem sosial dan politik yang mendapat legitimasi dari sistem nilai dan ideologi.

Di negara-negara dunia ke tiga pada umumnya kekerasan yang dilembagakan ini memakan korban, seperti kelompok minoritas dan kaum oposisi. Mereka yang dipandang musuh oleh negara, yaitu kelompok yang tidak sesuai dengan politik penguasa maka secara sistematis akan menjadi korban kekerasan ini. Kekerasan sebagai alat untuk memberikan hukuman bagi para pelanggar kekuasaan atau tatanan sosial telah mengalami pergeseran makna karena kekerasan menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian kekerasan yang tidak boleh dilakukan terhadap penguasa menjadi diperbolehkan terhadap rakyat biasa dan terhadap lawan politik dari penguasa.

Dalam kekerasan struktural terdapat dialektika antara pelaku dengan struktur. Penguasa cenderung mengatasmakan hukum dan ketertiban untuk melegitimasi perilaku kekerasan. Sementara pihak oposisi juga dapat melakukan kekerasan karena merupakan reaksi atas ketidaksetujuannya terhadap kebijakan penguasa. Selain itu ada pula kelompok yang berpendapat bahwa sistem yang berjalan dinilai tidak adil dan perlu diadakan perubahan maka kekerasan dengan dalih perubahan juga tidak dapat dielakkan. Sebenarnya suatu kekerasan akan melahirkan kekerasan lain, sehingga jika ada anggapan bahwa kekerasan seolah-olah dapat dianggap mampu menghentikan lawan namun pada hakekatnya hanya menunda kemunculan kekerasan lain sebagai reaksinya.

Francois Chirpaz (dalam Haryatmoko, 2003) memberikan batasan kekerasan adalah kekuatan yang sedemikian rupa dan tanpa aturan yang memukul dan melukai baik jiwa maupun badan, kekerasan juga mematikan entah dengan memisahkan orang dari kehidupannya atau dengan

Topik: Budaya Kekerasan

menghancurkan dasar kehidupannya. Melalui penderitaan atau kesengsaraan yang diakibatkannya, kekerasan nampak sebagai representasi kejahatan yang diderita manusia, tetapi dapat juga ia lakukan terhadap orang lain. Manusia dapat menjadi kurban, tetapi sekaligus tidak tertutup kemungkinan bahwa yang bersangkutan juga dapat melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain menjadi kurban. Setiap kekerasan dapat menimbulkan kekerasan yang baru. Artinya seseorang menggunakan kekerasan maka tidak akan dapat melepaskan diri tanpa ternodai oleh kekerasan tersebut.

Sementara itu para ahli psikologi sampai sekarang belum memiliki kesamaan pendapat mengenai pengertian kekerasan atau perilaku kekerasan. Hal ini dapat dipahami karena dalam merumuskan perilaku kekerasan mereka menggunakan pendekatan, orientasi, dan fokus perhatian yang berbeda pula. Lore dan Schults (2001) menyamakan istilah kekerasan dengan istilah agresi, yaitu untuk menggambarkan perilaku destruktif yang sulit dikontrol, perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain yang bervariasi bermula dari kekerasan yang termasuk ringan sampai dengan yang serius, seperti tindakan pembunuhan, ancaman verbal, dan keinginan bunuh diri. Pendapat senada dikemukakan oleh Roark (2003) yang menyatakan bahwa perilaku kekerasan tidak hanya meliputi tindakan yang bersifat fisik, melainkan juga mencakup kekerasan verbal, psikologis, dan simbolis, atau kombinasi dari berbagai aspek tersebut. Termasuk kekerasan verbal adalah ucapan yang merendahkan diri atau bernada penghinaan, kekerasan psikologis misalnya sikap yang mengingkari persamaan hak dan kemanusiaan, sedangkan kekerasan

simbolik berupa tindakan yang menimbulkan rasa takut dan permusuhan.

Berkowitz (1999) memberikan batasan perilaku kekerasan adalah perilaku yang dapat merugikan orang lain baik fisik, psikis, maupun sosial. Pengertian yang hampir sama diberikan oleh Acher dan Brown (dalam Semin & Fiedler, 1996) bahwa kekerasan merupakan bentuk khusus perilaku agresi yang cenderung pada serangan fisik yang tidak dapat dilegitimasi secara sosial. Beckmore dan Iglitzin seperti dikutip Roark (2003) memberikan pengertian perilaku kekerasan, yaitu bentuk perilaku agresi yang spesifik, yakni suatu tindakan menyerang, menyakiti, maupun melukai orang lain atau objek tertentu yang menyebabkan luka fisik, psikis, maupun mental. Giligan (1997) menegaskan bahwa ancaman psikis seringkali jauh lebih memerlukan perhatian daripada kekerasan fisik. Sementara itu Suryabrata (2000) memberikan batasan perilaku kekerasan sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit, kerusakan, mengandung bahaya, maupun tindakan destruktif lainnya yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendeiri. Pendapat ini didukung oleh Bushman dan Baumeister (1998) yang menyatakan bahwa kekerasan merupakan perilaku yang bersifat mengancam atau menimbulkan dampak negatif baik secara fisik, psikis, sosial, integritas pribadi, objek, maupun lingkungan.

Teori-teori tentang perilaku kekerasan

Perilaku kekerasan dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa teori. Menurut Allen et al (dalam Thalib, 2003) berbagai teori tersebut diantaranya adalah (1) teori belajar sosial, (2) teori insting, (3) teori kepribadian, (4) teori kognitif, dan (5) teori frustrasi agresi.

Teori Belajar Sosial

Menurut Bandura (dalam Thalib, 2003) perilaku individu pada umumnya dipelajari secara observasional melalui model, yaitu mengamati bagaimana suatu perilaku baru dibentuk dan kemudian menjadi informasi penting dalam mengarahkan perilaku. Sebagian besar perilaku individu diperoleh sebagai hasil belajar melalui pengamatan atas perilaku yang ditampilkan oleh individu lain yang menjadi model. Kendati demikian, motivasi individu untuk mencontoh perilaku kekerasan yang ditampilkan oleh model akan kuat jika model tersebut memiliki daya tarik dan kekerasan yang dilakukan tidak menimbulkan dampak yang negatif.

Teori belajar sosial diterapkan secara luas dalam mengkaji perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan dipelajari melalui pengalaman dan pengamatan. Contoh perilaku demonstrasi yang dilanjutkan dengan tindakan anarkis dapat menjadi model perilaku kekerasan bagi para demonstran. Teori belajar sosial ini juga tidak lepas dari kelemahan. Kritik terhadap teori ini adalah adanya keterbatasan dalam menjelaskan perilaku kekerasan yang disebabkan oleh adanya perbedaan individual seperti faktor kepribadian dan perbedaan kemampuan belajar. Dengan demikian tidak semua orang yang menyaksikan dan mengalami secara langsung perilaku kekerasan melakukan tindak kekerasan, hal ini karena adanya perbedaan individual dalam menghadapi perilaku kekerasan seperti kemampuan untuk mengendalikan diri.

Teori Insting

Suryabrata (2000) menyatakan bahwa teori Freud mengenai insting kerap mengundang kontroversi. Teori ini menegaskan bahwa timbulnya perilaku

kekerasan adalah karena insting, yaitu perwujudan psikologis dari suatu sumber rangsangan somatik dalam yang dibawa sejak lahir sehingga semua orang mempunyai kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Semula Freud mengemukakan bahwa perilaku kekerasan itu berkaitan erat dengan energi libidoseksual, jika insting seksual ini mengalami hambatan maka timbullah perilaku kekerasan. Selanjutnya Freud mengemukakan dikotomi energi positif dan energi destruktif yang keduanya diduga memiliki dasar biologistik yang harus terwujud dalam perilaku nyata. Jika energi destruktif mengarah ke pihak luar maka menjadi pemicu perilaku kekerasan terhadap orang lain, sedangkan jika mengarah pada diri sendiri maka dapat mendorong keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan mengarah ke perilaku bunuh diri.

Teori insting ini mendapat kritikan dari McDougal (dalam Hewstone et al, 1996) dengan argumentasi bahwa tidak benar jika naluri berpengaruh mutlak terhadap perilaku kekerasan. Memang perilaku kekerasan dapat merupakan bawaan tetapi pengekspresian dalam perilaku nyata banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bukan warisan genetik. Mengingat manusia adalah makhluk berbudaya maka perilaku kekerasan hanya didorong oleh faktor bawaan melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan inilah yang oleh Freud kurang mendapat perhatian.

Teori Kepribadian

Rivinus dan Larimer (2003) mengemukakan bahwa, sifat-sifat kepribadian sebagai sifat internal berkorelasi dengan perilaku kekerasan termasuk erosi kontrol internal terhadap sikap cepat marah. Anak yang mengalami gangguan seperti cepat

Topik: Budaya Kekerasan

marah dan mudah menyerang cenderung mengembangkan pola perilaku kekerasan pada usia selanjutnya. Dengan demikian faktor temperamen yang merupakan bagian dari komponen kepribadian berkaitan dengan perilaku kekerasan. Peran stabilitas agresivitas mengindikasikan bahwa kepribadian seseorang berpengaruh terhadap kecenderungan perilaku kekerasan.

Megargee (dalam Baron 1997) mengemukakan salah satu ciri kepribadian, yaitu *undercontrolled aggressive* dimiliki oleh para pelaku kekerasan. Seseorang yang termasuk tipologi *undercontrolled aggressive* memiliki penghambat internal yang lemah maka yang bersangkutan cenderung melakukan kekerasan hanya disebabkan oleh rangsang yang tidak cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa tipologi kepribadian *undercontrolled aggressive* cenderung melakukan kekerasan yang lebih serius jika dibandingkan dengan tipologi kepribadian *overcontrolled aggressive*. Dengan demikian variabel kepribadian berkorelasi dengan perilaku kekerasan. Teori ini memiliki kelemahan karena dalam menjelaskan perilaku kekerasan tidak mempertimbangkan faktor yang bersifat eksternal.

Teori Kognitif

Konsep dasar teori kognitif sebagaimana dikemukakan oleh Bordwell (dalam Thalib, 2003) mengacu pada kegiatan mental yang tidak dapat diubah begitu saja dalam menjelaskan perilaku sosial dengan postulat yang sesungguhnya seperti persepsi, pikiran, intensi, perencanaan, keterampilan, dan perasaan. Teori kognitif sosial menekankan pentingnya interaksi resiprokal faktor-faktor individu sebagai penentu perilaku kekerasan.

Kecenderungan perilaku kekerasan dapat dijelaskan dengan mengacu pada teori kognitif. Pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan, seperti menyaksikan demonstrasi yang diwarnai dengan aksi kekerasan, menyaksikan tayangan film tentang kekerasan dan mengalami serta merasakan sendiri perilaku yang berkaitan dengan kekerasan berpengaruh secara langsung terhadap perilaku kekerasan.

Teori Frustrasi-Agresi

Terjadinya frustrasi adalah jika seseorang tidak dapat memiliki sesuatu yang diinginkan pada waktu orang tersebut benar-benar memerlukannya. Dollard et al seperti dikutip oleh Wimbarti (1996) berkeyakinan bahwa setiap tindakan agresi dan kekerasan pada akhirnya dapat dilacak penyebabnya dalam kaitannya dengan frustrasi. Frustrasi merupakan salah satu faktor penentu agresi dan kekerasan. Adanya penghambat untuk mencapai tujuan yang diharapkan dapat menimbulkan dorongan ke arah agresi emosional. Kecenderungan untuk menyakiti orang lain karena keadaan frustrasi tergantung pada sejauhmana tingkat kepuasan yang diharapkan, kegagalan memperoleh kepuasan, dan seberapa sering seseorang terhambat dalam mencapai tujuan.

Teori ini juga tidak lepas dari kritik ketika frustrasi tidak senantiasa memunculkan perilaku agresi dan kekerasan. Frustrasi tidak selalu mengakibatkan agresi dan agresi tidak selalu didahului oleh frustrasi. Berkowitz (dalam Thalib, 2003) menegaskan bahwa frustrasi menyebabkan sikap siaga untuk bertindak secara agresif karena individu dalam keadaan marah yang disebabkan oleh frustrasi itu sendiri. Seseorang akan bertindak secara agresif

atau tidak sangat tergantung pada kehadiran isyarat agresif yang memicu kejadian aktual suatu perilaku agresi. Dengan demikian frustrasi hanyalah salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku agresi dan kekerasan di samping faktor-faktor lainnya.

Partisipasi Politik dan Perilaku Kekerasan di Indonesia

Cribb (2005) mengemukakan bahwa masalah kekerasan secara tiba-tiba masuk ke dalam agenda analisis kehidupan politik Indonesia pada pertengahan tahun 1990-an. Pada masa sebelumnya, para peneliti memiliki pemahaman bahwa Orde Baru dibangun di atas landasan kekerasan, anti komunisme, tegas dalam menghadapi pihak-pihak yang berbeda pendapat, serta keras dalam menghadapi pemberontakan. Menurut Liddle (1995) kekerasan merupakan satu dari tiga tonggak yang menopang kekuasaan Orde Baru selain kinerja ekonomi dan manipulasi ideologi. Orde Baru menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak jika gagal menggunakan ungkapan untuk membujuk warga negara agar mau mematuhi kekuasaannya. Banyak perdebatan yang timbul mengenai seberapa jauh ketiga unsur di atas, yaitu kekerasan, kinerja ekonomi, dan manipulasi ideologi dianggap signifikan untuk mempertahankan kekuasaan Orde Baru. Kendatipun ada perbedaan pendapat tentang sampai seberapa jauh Orde Baru tergantung pada kekerasan namun pada umumnya terdapat kesamaan pendapat bahwa kekerasan adalah seimbang dengan apa yang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan Orde Baru tersebut.

Selama Orde Baru berkuasa jarang sekali dikaji mengenai politik yang menyinggung tentang kemungkinan pemerintahan yang cenderung otoriter

ternyata memberikan kontribusi terhadap ketertiban sosial. Hal ini menurut Cribb (2005) disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) sejak zaman penjajahan sudah muncul opini bahwa secara internal masyarakat tradisional Indonesia adalah masyarakat yang damai. Belanda juga memberikan gambaran tentang orang Jawa sebagai manusia yang paling lembut di muka bumi (2) berkembangnya ide bahwa Orde Baru merupakan suatu kekuatan untuk kedamaian sosial sebagai lawan dari adanya pembantaian massal yang dilakukan oleh para anggota PKI pada tahun 1965. Bahkan pada awal pemerintahan Orde Baru muncul slogan yaitu tidak ada politik, dan tidak ada ideologi dan yang ada hanyalah pembangunan bidang ekonomi. Hal ini berbeda dengan masa Orde Lama yang mengutamakan kehidupan politik. Pada masa Orde Lama timbul ungkapan bahwa politik sebagai "panglima". Maksudnya demi kepentingan politik maka semua aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat disubordinasi. Sementara itu Orde Baru lebih mengutamakan dan memfokuskan pada pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perilaku kekerasan di Indonesia dengan mekanisme dan upaya untuk mengatasi konflik memiliki sejarah yang panjang. Berbagai konsep berkaitan dengan perilaku kekerasan, pertikaian yang mengerikan sering dianggap sebagai peninggalan Orde Baru dan lemahnya kontrol negara pada masa reformasi. Namun jika dirunut ke belakang sebenarnya perilaku kekerasan telah terjadi pada masa kolonial. Pada masa itu kerap terjadi para pelaku menyewa kelompok jagoan untuk mengintimidasi lawan politik dengan menggelar demonstrasi. Para bangsawan Jawa juga mendorong pembentukan kelompok-kelompok penjaga keamanan lingkungan.

Topik: Budaya Kekerasan

Pada masa kemerdekaan perilaku kekerasan seperti itu dikenal juga pada pemerintahan Orde Lama dan mencapai puncak pada masa Orde Baru. Adanya kerusuhan di lapangan sepak bola, tawuran anak sekolah, pertikaian antar warga masyarakat, amuk masa, pertikaian antar suku dan antar agama, sudah terjadi pada awal abad 20 (Dijk, 2002).

Menurut Klinken (2005) perilaku kekerasan di Indonesia justru bermunculan pada saat bangsa ini memasuki era reformasi. Bahkan daftar perilaku kekerasan pada era reformasi ini menjadi lebih panjang dari masa sebelumnya. Masalah Timor Timur, Papua, dan Aceh adalah konflik melawan negara yang melahirkan banyak perilaku kekerasan masa dan pasca Orde Baru. Di samping itu juga terjadi perilaku kekerasan di berbagai daerah seperti (a) Poso Sulawesi Tengah (1998-2001), (b) Ambon dan Maluku Selatan (1999-2002), (c) Kalimantan Barat (1999-2001), (d) Maluku Utara (1999-2001), dan Kalimantan Tengah (2001). Berikut ini dipaparkan beberapa peristiwa di atas yang sarat dengan perilaku kekerasan

Kerusuhan dan kekerasan di Poso terjadi bersamaan dengan transisi politik yang ada di kabupaten Poso ketika Bupati Poso menyatakan tidak akan ikut dalam pemilihan untuk periode berikutnya. Sebetulnya baik bupati lama yang akan digantikan dan calon bupati yang akan menggantikan bukan orang-orang yang mempersoalkan agama, namun kelompok pelobi masing-masing menghimpun dukungan yang akhirnya memasuki wilayah agama. Sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, Poso juga memiliki banyak organisasi keagamaan tetapi infrastruktur politiknya termasuk lemah. Hal-hal inilah akhirnya yang menjadi sumber meletusnya

perilaku kekerasan dan kerusuhan di Poso Sulawesi tengah.

Kekerasan di Ambon memiliki berbagai kesamaan dengan kekerasan di Poso. Persepsi mengenai ancaman dan kesempatan bagi umat beragama di seputar kontrol atas Negara. Pemilihan umum dimaknai sebagai upaya mobilitas para elit politik dalam kehidupan bernegara. Jadwal pemilihan umum tahun 1999 baru dimulai pada bulan Desember 1998 sehingga terasa jauh lebih pendek waktunya dari pada biasanya. Dalam waktu yang relatif sangat pendek tersebut, partai politik berusaha keras menyusun kekuatan dan mencari dukungan. Sebagaimana yang telah mereka lakukan sebelumnya, partai-partai politik memanfaatkan organisasi-organisasi keagamaan untuk menghimpun dukungan sebelum pemilihan umum. Dalam upaya mencari dukungan melalui mobilisasi massa itulah meletusnya kerusuhan dan perilaku kekerasan di Ambon.

Untuk memahami perilaku kekerasan di Maluku Utara tidak dapat dilakukan tanpa merujuk pada pertarungan tentang siapa yang akan menjadi gubernur propinsi baru Maluku Utara yang berdiri bulan September 1999. Dalam perjalanannya diperlukan waktu sampai bulan Oktober 2002 setelah Maluku Utara dipimpin oleh Penjabat Gubernur yang diangkat dari pusat. Perilaku kekerasan dan kerusuhan muncul menjelang pemilihan gubernur yang berlarut-larut dilaksanakan di bawah pengawasan yang sangat ketat dari pusat.

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Kalimantan Barat, menimbulkan segmentasi dan perasaan dipinggirkan yang makin besar di kalangan masyarakat Dayak. Perdagangan di pedesaan berada di tangan orang Tionghoa, lahan pertanian diambil alih oleh para

transmigran dan pengusaha dari luar daerah, serta aparat birokrasi juga banyak yang berasal dari daerah lain. Demikian pula harapan sebagian masyarakat untuk dapat melakukan mobilitas ke atas yang diwacanakan selama pemerintahan Orde Baru tidak terwujud. Kondisi demikian makin menyudutkan posisi orang Dayak dan melahirkan perasaan senasib sepenenderitaan yang menguatkan perasaan kesukumannya. Hal ini tampak jelas dalam pola perilaku kekerasan yang meletus pada awal tahun 1997. Perilaku kekerasan dan kerusuhan yang terjadi bersifat spontan untuk melindungi kehormatan suku Dayak.

Dalam episode politik pertentangan, suatu proses terakhir yang biasanya dapat disaksikan adalah pembentukan pelaku politik baru. Perilaku kekerasan yang terjadi di Kalimantan Tengah pada bulan Februari 2001 memperkenalkan pelaku-pelaku yang sebelumnya tidak terorganisir atau apolitis dalam proses konflik penduduk. Masyarakat Dayak yang tidak pernah dilihat sebagai pelaku politik sejak sukses sederhana Partai Dayak pada Pemilihan Umum 1955, tiba-tiba menjadi pelaku tunggal yang mampu mengusir hampir semua orang Madura dari wilayah itu. Para elit Dayak yang banyak tinggal di Palangkaraya dan Sampit mengembangkan slogan bahwa mereka adalah tuan di tanahnya sendiri dan pihak-pihak lain harus mengakui dengan cara asimilasi budaya. Mereka meminjam pepatah Melayu "dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung" untuk melawan migran asal Madura yang dinilai tidak berasimilasi dengan budaya mereka. Dalam bahasa birokrasi padanan slogan tersebut adalah istilah yang ada dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah "bahwa pejabat setempat harus mengenal dan dikenal oleh penduduk setempat". Slogan lain yang juga mereka kumandangkan dan

dimaknai secara sempit adalah istilah "putra daerah" yang merupakan bentuk lokal dari istilah pribumi atau bumiputra. Dua slogan yang merupakan kata kunci tersebut nampaknya menjadi landasan yang mendorong perilaku kekerasan di Kalimantan Tengah.

Dari berbagai kasus perilaku kekerasan di beberapa daerah di atas dapat digarisbawahi bahwa partisipasi politik warga masyarakat pada masa transisi menuju kehidupan yang lebih demokratis pasca Orde baru telah banyak menelan korban jiwa dan harta benda. Dengan kalimat lain, perilaku kekerasan yang terjadi di beberapa wilayah tersebut berkenaan dengan transisi politik terutama meningkatnya partisipasi politik warga masyarakat seiring dengan perubahan kehidupan politik dari masa Orde Baru menuju era reformasi. Perilaku kekerasan yang terjadi di Poso dan Kalimantan Tengah berkaitan dengan kontrol atas kabupaten-kabupaten yang diatur dalam undang-undang tentang otonomi daerah yang baru. Perilaku kekerasan di Ambon terkait dengan aspek-aspek provinsi dari pemilihan umum, sedangkan perilaku kekerasan di Maluku Utara dan Kalimantan Barat berkaitan dengan pembentukan provinsi dan kabupaten baru.

Perilaku kekerasan di berbagai daerah di atas dapat dikategorikan bentuk kekerasan politik dan ada kesamaan dengan perilaku kekerasan yang terjadi dan menyertai masa transisi sebelumnya, seperti masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, pemberontakan yang menandai awal Demokrasi Terpimpin, dan revolusi 1945 untuk mencapai kemerdekaan meskipun masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

Perilaku kekerasan merupakan fenomena yang mendominasi dalam

Topik: Budaya Kekerasan

melakukan partisipasi politik di Indonesia. Di samping marak terjadi di berbagai daerah seperti diuraikan di atas, masa transisi dari Orde Baru ke era reformasi ditandai oleh peristiwa tragis yang sangat memilukan seperti kerusuhan yang terjadi bulan Mei 1998 disertai penjarahan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan sehingga menelan banyak korban jiwa dan harta benda. Pada era reformasi perilaku kekerasan juga terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah terutama saat kegiatan kampanye dan ketika menyaksikan kontestan dan atau calonnya ternyata kalah dalam pemilihan tersebut. Hampir setiap hari terjadi bentrokan antara kelompok yang mendukung dan menolak kebijakan pemerintah; juga maraknya demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi yang berakhir bentrok dengan aparat disertai tindakan anarkhis. Bahkan perilaku kekerasan juga memasuki ruang persidangan lembaga legislatif tingkat pusat dan daerah maupun dalam persidangan lembaga yudikatif yang seolah-olah menjadi pemandangan yang biasa pada era reformasi ini.

Jika dikaitkan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, sebenarnya perilaku kekerasan yang akhir-akhir ini marak terjadi sama sekali tidak berakar pada budaya bangsa karena bangsa Indonesia memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Falsafah hidup yang mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, tolong menolong, tenggang rasa, tepo seliro, ramah tamah, pemaaf, musyawarah untuk mufakat, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, dan toleransi merupakan karakteristik kepribadian yang sesuai dan berakar pada budaya bangsa Indonesia.

Pada era reformasi ini peningkatan partisipasi politik warga negara perlu

diupayakan secara terus menerus dengan tanpa diikuti oleh perilaku kekerasan. Berbagai upaya yang dapat ditempuh untuk menanggalkan dan meninggalkan perilaku kekerasan misalnya dengan (a) penegakan hukum, artinya bahwa hukum harus dilaksanakan sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat, (b) perlindungan hak asasi manusia, (c) peningkatan pembangunan yang berkeadilan, demokratis, dan menyejahterakan rakyat, (d) pemberitaan media massa yang berkaitan dengan perilaku kekerasan secara selektif dan proporsional. Sesuai dengan teori belajar sosial, maka melalui tayangan dan pemberitaan di media massa yang berkaitan dengan perilaku kekerasan, masyarakat justru dapat belajar dan memperoleh pemahaman untuk kemudian menghindarinya. Lebih dari itu, bahwa ternyata perilaku kekerasan tidaklah tepat jika menjadi model dan "trend" yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi, (e) pemberian *reward* kepada pimpinan organisasi, instansi, dan perusahaan yang dapat mewujudkan budaya anti kekerasan di lingkungannya, dan (f) reposisi lembaga pendidikan agar di samping dapat berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mampu menanamkan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. ●

Daftar Pustaka

- Baron, Robert A. 1997. *Human Aggression*. New York and London : Plenum Press.
- Berkowitz, L. 1999. *Aggression : A Social Psychology Analysis*. New York : McGraw-Hill Book Company.

- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bushman, B.J. and Baumeister, R.F. 1998. Treated Egoism, Self-Esteem, and Direct and Displaced Aggression. : Does Self-Love or Self-Hate lead to Violence? *Journal of Personality and Social Psychology*, 75, 219 – 229.
- Cribb, Robert. 2005. Pluralisme Hukum, Desentralisasi, dan Akar Kekerasan di Indonesia. dalam Anwar, Dewi Fortuna., Bouvier, Helene., Smith, Glenn., dan Tol, Roger. (Eds). *Konflik Kekerasan Internal Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Dijk, Kees van. 2002. The Realms of Order and Disorder in Indonesia Life. In Husken, Frans and Jonge, Huub de (Eds). *Violence and Vengeance : Discontent and Conflict in New Order Indonesia*. 71 – 94. Saarbrucken : Verlag fur Entwicklungspolitik.
- Gilligan, John. 1997. *Violence*. New York : Vintage Books.
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik Kekuasaan*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Hewston, M., Stroebe, W., and Stephenson, G.M. 1996. *Introduction to Social Psychology : An European Perspective*. Massachusetts : Blackwell Publisher Ltd.
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, John. 2001. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Klinken, Gerry van. 2005. Pelaku Baru Identitas Baru : Kekerasan antar Suku pada masa Pacsu Soeharto di Indonesia. dalam Anwar, Dewi Fortuna., Bouvier, Helene., Smith, Glenn., dan Tol, Roger. (Eds). *Konflik Kekerasan Internal Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Liddle, William R. 1995. 'Soeharto's Indonesia : Personal Rule and Political Institutions'. *Pacific Affairs*. 58, 68 – 90.
- Lore, Robert .K. and Schulth, L.A. 2001. Control of Human Aggression : A Comparative Perspective. *American Psychologist*, 48, 16 – 25.
- Mas'ood, Mochtar dan MacAndrew, Colin. (eds.) 1999. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Milbrath, Lester and Goel, M.L. 1997. *Political Participation*. Chicago : Rand McNally College Publishing Co.
- Rivinus, T.M. and Larimer, M.E. 2003. Violence, Alcohol, Other Drugs, and the College Students. *Journal of College Student Psychotherapy*, 8, 71 – 119.
- Roark, M.L. 2003. Conceptualizing Campus Violence : Definitions, Underlying Factors, and Effects. in Leighton, C., Whitaker and Jeffrey, Pollard W. (eds.) *Campus Violence : Kinds, Causes, and Cures*. 1 – 28. New York : The Haword Press.
- Semin, Gun R. and Fiedler, Klaus. 1996. *Applied Social Psychology*. London : Sage Publishing Ltd.

Topik: Budaya Kekerasan

Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Suryabrata, Sumadi. 2000. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Thalib, Syamsul Bachri. 2003. Analisis Model Faktor-Faktor Penentu Kecenderungan Perilaku Kekerasan

Siswa. *Disertasi*. Yogyakarta : Program Pasca Sarjana UGM.

Wimbarti, Supra. 1996. Children Aggression in Indonesia : The Effect of Culture, Familial Factors, Peers, TV Violence Viewing, and Temperament. *Disertation*. California : University of Southern California.

